PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	03111	Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip antara lain: ikan	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar	- Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	1. Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak menggunakan kapal pe-	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			cakalang, madidihang, tongkol krai, tongkol komo, pelagis besar lainya, layang, kembung, selar, lemuru, kembang, pelagis kecil lainnya, kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut,						3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan penangkapan	- Surat Izin Penang-kapan Ikan	nangkap ikan dan 2. Daerah penang-kapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kerapu, pari, kurisi, remang, tembang, siro, beronang, biji nangka, tenggiri bulat, belanak, julung-julung, tuna lainnya, ikan tuna mata besar, albacora, marlin, meka, lencam, kapas-kapas, ikan karang, ikan						ikan di kawasan konservasi dan 6. Memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon, bagi yang menempatkan rumpon --- Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampai-kan informasi:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			demersal lainnya, di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang di-pengaruhi pasang surut						a. Daerah penang-kapan ikan dan b. Alat penang-kapan ikan			
				- Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampai-kan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana penga-daan kapal perikan-an dan	7 Hari	1. Merealisasi-kan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin penangkapan ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil		1. Kapal pe-nangkap ikan ber-ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pe-nangkap ikan sesuai	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum d. Pas foto orang perseorangan atau		tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah penangkapan ikan di WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang per-seorangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
				- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampai-kan permohonan	4 Hari	1. Merealisasi-kan kapal penangkap		1. Kapal pe-nangkap ikan ber-ukuran di	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk		ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin penangkapan ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.A.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau pe-nanggung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orangan atau penanggung jawab badan hukum 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
2	03112	Penangkapan *Crustacea* di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penang-	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan:	- Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan	1. Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapan *Crustacean* meliputi udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster, kepiting, rajungan dan *Crustacea* laut lainnya di laut, muara sungai, laguna dan Tempat lain yang dipenga-ruhi						1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan	Ikan di Kawa-san Konser-vasi - Surat Izin Penang-kapan Ikan	(lima) GT atau tidak meng-gunakan kapal pe-nangkap ikan dan 2. Daerah penang-kapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pasang surut						penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan penangkapan ikan di kawasan konservasi --- Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampai-kan informasi:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Daerah penangkapan ikan dan b. Alat penangkapan ikan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal	7 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin penangkapan ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum		ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pas foto orang perseora-ngan atau pe-nanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang per-seorangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan	4 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin penangkapan ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau pe-nanggung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-		tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perscorangan atau penanggung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang per-seorangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan					
3	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan mollusca meliputi cumi-cumi, sotong, gurita, dan jenis lainnya remis, simping, kerang darah, kerang hijau, tiram, dan jenis	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai	- Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi - Surat Izin Penangkapan Ikan	1. Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kekerangan lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipenga-ruhi pasang surut						ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di kawasan konservasi Bagi yang tidak menggunakan		wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha,	7 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh)	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang		Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah Penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perseoran-gan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau pe-nanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau				wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perseora-ngan atau penang-gung jawab badan hukum dan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat:	4 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah Penangkapan ikan pada	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau		3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perseora-ngan atau pe-nanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perseora-ngan atau penang-gung jawab badan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perseorang-an atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
4	03114	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan/ pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti algae, rumput laut,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan	Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	1. Kapal penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah penangkap-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ganggang laut, dan tumbuhan hias di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang di-pengaruhi pasang surut						4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di		an ikan padaWPPN RI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kawasan konservasi Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	03115	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan/ pengambilan induk/ benih ikan, induk/ benih udang, induk/ benih kerang, induk/ benih kepiting, dan induk/ benih biota lainnya di laut, muara sungai,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-	- Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi - Surat Izin Penangkapan Ikan	1. Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			laguna, dan tempat lain yang dipenga-ruhi pasang surut						undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di kawasan konservasi --- Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil		yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi	7 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penang-		petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan				trasi provinsi yang ber-sangkutan	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana peng-	4 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI di atas 12	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							adaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab		pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		(dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Spccimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan					

SK No 122596 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
6	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan/ pengambilan jenis echinodermata seperti bintang laut,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan	- Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi - Surat Izin Penang-	1. Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan dan	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			teripang, bulu babi, lili laut, dan lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipenga-ruhi pasang surut						4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di	kapan ikan	2. Daerah penang-kapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kawasan konservasi Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
				- Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan	7 Hari	1. Merealisasikan kapal		1. Kapal penangkap	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar			permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk		penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penang-kapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.49

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna				2. Daerah penang-kapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
				- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampai-kan permohonan	4 Hari	1. Merealisasi-kan kapal penangkap		1. Kapal pe-nangkap ikan ber-ukuran di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk		ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orangan atau penang-gung jawab badan hukum 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
7	03117	Penang-kapan Coelen-terata di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan:	- Tanda Daftar Kegiatan Penang-kapan	1. Kapal penangkap ikan berukuran sampai	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Penangkapan ikan coelenterate seperti anemone laut, polip, ubur-ubur dan lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut						1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan	Ikan di Kawasan Konservasi - Surat Izin Penangkapan Ikan	dengan 5 (lima) GT atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di kawasan konservasi Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampai-kan informasi:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal	7 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum		pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
8	03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan/ pengambilan ikan hias laut, seperti kuda laut (hippocampus), angel fish, clown fish,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan	- Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi - Surat Izin Penang-	1. Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah penangkapan ikan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lion fish, ikan sekar taji layar lurik, ikan buntel pasir, ikan kalong, dan ikan hias lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipenga-ruhi pasang surut						terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di kawasan konservasi	kapan Ikan	pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.64

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan	7 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk		lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		(lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah penang-	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna				kapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkut-an	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.67

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
9	03119	Penang-kapan Biota Air	Kelompok ini mencakup usaha atau	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan	- Tanda Daftar Kegiatan	1. Kapal penangkap ikan berukuran	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Lainnya di Laut	kegiatan Penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut						kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan	Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi - Surat Izin Penangkapan Ikan	sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di kawasan konservasi Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan		dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.71

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan	7 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum		untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan				yang ber-sangkutan	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
10	03121	Penang-kapan Pisces/ Ikan Bersirip di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penang-kapan pisces/ikan bersirip air tawar menangkap jenis ikan betok, sepat, bilih, depik, genggehek, kancera, kendia,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Melaporkan ikan hasil tangkapan Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan:	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkut-an	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lalang, mas, lukas, repang, lampan, tawes, seren, tontong tebu, tambakan, tempe, sumpit, sepat rawa, berukung, jelawat, parang, teri, bentilak, lais, sepat siam, betutu, gurame, sidat, baung, keting, gabus, toman, lele,						1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hampal, lalawak, nilem, semah, silih, belida, siluk/arwana, patin, lempuk, mujair, nila, ikan bersirip, beunteur, koan, di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya									

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan *Crustacea* air tawar, seperti udang grago (*Athya* spp), udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*), udang tawar (*Palaemon* spp), dll di perairan darat, seperti di danau,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penang-	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/kota yang bersangkutan	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya						kapan ikan dan b. Alat Penang-kapan ikan			
12	03123	Penang-kapan Mollusca di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penang-kapan mollusca air tawar seperti remis (Meretrix-spp), siput (Philalanka sp) dll di perairan darat, seperti di	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan:	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkut-an	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya						1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
13	03124	Penangkapan/ pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan/ pengambilan semua jenis	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkutan	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tumbuhan air, seperti ganggang, eceng gondok, lumut, dan tumbuhan hias di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya						2. Memiliki Buku Kapal Perikanan Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	03125	Penangkapan/ pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan induk/ benih ikan sidat, arwana, baung: di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penang-	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkutan	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapan ikan dan b. Alat Penang-kapan ikan			
15	03126	Penang-kapan Ikan Hias di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkap an ikan hias di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, seperti ikan	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkut-an	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pelangi dan botia						tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
16	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan/ pengambilan hewan atau biota air tawar seperti	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkutan	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			katak, bulus, labi-labi, belut, dan lainnya di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya						3. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan b. Alat Penangkapan ikan c. Pelabuhan pangkalan atau sentra nelayan dan d. Ukuran kapal penangkap ikan --- Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Dacrah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
17	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 2. Menerapkan cara distribusi	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ikan yang baik dan 3. Laporan kegiatan usaha			
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar			1. Memiliki Sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dan 2. Laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja dan d. Wilayah distribusi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mitra usaha			
18	03143	Jasa Pasca Panen Penang-kapan Ikan di Perairan Darat	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan sistem jami-nan mutu dan keamanan hasil per-ikanan 2. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik dan 3. Laporan kegiatan usaha	Sertifikat Penerap-an Distri-busi Ikan	Seluruh	Bupati/ Wali Kota
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar			1. Memiliki Serti-fikat pene-rapan distri-busi ikan paling lama 1 (satu) tahun sejak		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.90

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diterbitkan dan 2. Laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja dan d. Wilayah distribusi dan mitra usaha			
19	03151	Penangkapan/pengambilan Ikan Bersirip (*Pisces*) yang dilindungi dan/atau Termasuk	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan jenis ikan taksa ikan bersirip (*Pisces*) yang	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dalam *Appendiks* CITES	dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES sesuai ketentuan perlindungannya, yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan komersial, pengembangbiakan, perdagang-				Pengambilan/ Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		realisasi pemanfaatan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor 4. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ Penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an dalam negeri, perdagang-an luar negeri, dan aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Contoh ikan bersirip yang termasuk kelompok ini: Ikan Napoleon, Ikan Capungan Banggai, Ikan Hiu Lanjaman, Ikan Hiu Martil, dan						mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemi-likan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Ikan Pari Mobula Kelompok ini tidak mencakup Penang-kapan untuk tujuan perdagang-an jenis ikan bersirip yang dilindungi penuh, dilarang peredaran-nya berdasar-kan regulasi nasional dan/atau tercantum dalam						Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkut-an ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			daftar *Appendiks* I CITES, seperti Ikan Arwana Merah dan Ikan Pari Gergaji						dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
20	03152	Penangkapan/ pengambilan *Crustacea* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appen-*	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan jenis ikan taksa *Crustacea* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.96

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		diks CITES	sesuai ketentuan per-lindungan-nya, yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan komersial, pengem-bang-biakan, perdagang-an dalam negeri, perdagang-				Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		pemanfaatan secara berkala 3. Menyampai-kan usulan kuota ekspor 4. Menyampai-kan usulan kuota pengambilan/ penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsip-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an luar negeri, aquaria, hasil dari kegiatan Penang-kapan Kelompok ini tidak mencakup Penangkap an jenis ikan taksa *Crustacea* yang dilindungi penuh, dilarang peredaran-nya berdasar-kan regulasi nasional dan/atau tercantum						kan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkut-an antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dalam daftar *Appendiks* I CITES, seperti *Tachypleus gigas*, *Tachypleus tridentatus* dan *Carcinoscorpius rotundicauda*						Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
21	03153	Penangkapan/ pengambilan *Mollusca* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan jenis ikan taksa *Mollusca* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES sesuai ketentuan perlindungannya,	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari alam 2. Proposal/ dokumen	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan komersial, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan				3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		4. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Penang-kapan Contoh *Mollusca* yang masuk dalam kelompok ini: *Tridacna spp* , (Kima) dan *Strombus gigas* (Keong Ratu) Kelompok ini tidak mencakup Penang-kapan untuk tujuan perdagang-an jenis ikan taksa						akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkut-an antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melaku-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Mollusca yang dilindungi penuh, dilarang peredaran-nya berdasar-kan regulasi nasional dan/atau tercantum dalam daftar *Appendiks* I CITES, seperti: *Nautilus spp, Hip-popus hippopus, Hippopus porcella-nus, Cassis cornuta*						kan peng-angkutan ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengang-kutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfa-atan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan *Charonia tritonis*						yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
22	03154	Penangkapan/ pengambilan *Coelenterata* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Coelenterata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaat-	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor 4. Menyampaikan usulan kuota	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			annya sesuai ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan, pengem-bang-biakan, perdagang-an dalam negeri,				Negara Bukan Pajak		pengambilan/ Penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perdagang-an luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Daftar *Coelentera-ta* yang masuk dalam kelompok ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan regulasi dan/atau keputusan Konvensi CITES						8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini tidak mencakup pengambilan jenis *Coelenterata* yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penangkapan/ pengambilannya berdasarkan						ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kebijakan Pemerintah Contoh: karang keras Ordo *Scleractinia*						dalam *Appendiks* CITES			
23	03155	Penangkapan/ pengambilan *Echinodermata* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *echinodermata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor 4. Menyampaikan usulan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dibatasi pemanfaat-annya sesuai ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan, pengem-bangbia-kan, perdagang-				4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		kuota pengambilan/ penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an dalam negeri, perdagang-an luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Contoh *Echinoder-mata* yang masuk dalam kelompok ini: *Holothoria fuscogilva*, *Holothuria nobilis*, dan *Holothuria whitmaei* Kelompok ini tidak mencakup						8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melaku-kan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengambil-an jenis *Echinoderm ata* yang dilindungi penuh berdasar-kan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* CITES dan/atau dilarang Penang-kapan/ pengambil-annya berdasar-kan kebijakan Pemerintah						10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melaku-kan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.111

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Appendiks CITES			
24	03156	Penangkapan/ pengambilan Amphibia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Amphibia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor 4. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ penangkapan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.112

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan, pengem-bangbia-kan, perdagang-an dalam negeri, perdagang-an luar						5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Contoh *Amphibia* yang masuk dalam kelompok ini: *Amyda cartiliginea* (Labi-Labi) dan *Orlitia borneensis* (Kura-Kura Sungai Kali-mantan) Kelompok ini tidak mencakup pengambil-an jenis						berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkut-an antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.114

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Amphibia yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penangkapan/ pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah						10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.115

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Appendiks CITES			
25	03157	Penangkapan/ pengambilan *Reptilia* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *reptilia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.116

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri,						4. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengambilan/penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Kelompok ini tidak mencakup pengambil-an jenis *reptilia* yang dilindungi penuh berdasar-kan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penang-						dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapan/pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah, seperti: Penyu						berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
26	03158	Penangkapan/ pengambilan Mamalia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appen-*	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *mamalia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.120

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		diks CITES	diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan				Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		pemanfaatan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor 4. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ Penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsipkan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengem-bangan, pengem-bangbiak-an, perdagang-an dalam negeri, perdagang-an luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Kelompok ini tidak mencakup pengambil-an jenis mamalia yang dilindungi penuh berdasar-						dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkut-an antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.122

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penang-kapan/ pengambil-annya berdasar-kan kebijakan pemerintah seperti: paus, lumba-lumba, dan dugong						Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan peng-angkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
27	03159	Penangkapan/ pengambilan *Algae* dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Algae* dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau *Appendiks*	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.124

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Appendiks CITES	CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan				2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		3. Menyampaikan usulan kuota ekspor 4. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ Penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penangkapan Kelompok ini tidak mencakup pengambilan jenis *Algae* dan biota perairan						usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.126

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lainnya yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penangkapan/ pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah						Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.127

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
28	03211	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif atau 2. Di kawasan kon-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											servasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Standar proses produksi pembesaran pisces/ikan bersirip laut dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif atau 2. Di kawasan konservasi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan				yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	
											1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi super intensif 2. Wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut/ laut lepas	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.130

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											3. Menggunakan tenaga kerja asing 4. Di kawasan konservasi nasional 5. Di kawasan strategis nasional 6. Di kawasan strategis nasional tertentu	
29	03212	Pembenihan Ikan Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk	Sertifikat cara pembenihan ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupa-	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Menerapkan cara pembenihan Ikan yang baik		ten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan dan 3. Memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.133

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Rencana pembiayaan				kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											3. Menggunakan teknologi super intensif	
30	03213	Budidaya Ikan Hias Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/Walikota
											1. Lokasi usaha berada di	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Standar proses produksi budi daya ikan hias air laut dan		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan	Bupati/ Wali Kota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.136

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif atau 2. Di kawasan kon-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											servasi yang dikelola oleh pemerin-tah daerah provinsi	
											1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggu-nakan teknologi super intensif 2. Lokasi usaha berada di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											3. Menggunakan tenaga kerja asing 4. Di kawasan konservasi nasional 5. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 6. Di kawasan strategis nasional tertentu	
31	03214	Budidaya Karang (Coral)	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/ atau	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									daya ikan yang baik		2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Standar proses produksi budi daya karang (*coral*) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya		1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		ikan yang baik		daerah provinsi	
											1. Menggunakan tenaga kerja asing 2. Di kawasan konservasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/ Kepala Badan
32	03215	Pembesaran Mollusca Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan	Sertifikat cara budi daya	1. Di laut sampai dengan 12 (dua	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	ikan yang baik	belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki	3 Hari	1. Standar proses produksi mollusca laut 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya		1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		ikan yang baik		daerah provinsi	
											1. Menggunakan tenaga kerja asing 2. Di kawasan konservasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.143

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33	03216	Pembesaran *Crustacea* Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik 3. Melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50 g/ekor atau pelepasliaran 2% dari hasil panen sesuai dengan segmentasi usaha dan	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Setelah melakukan usaha pembesaran kepiting soka selama 3 tahun selanjutnya wajib menggunakan benih kepiting soka produksi sendiri			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran *Crustacea* laut		1. Menggunakan tenaga kerja asing 2. Di kawasan kon-	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		2. Laporan kegiatan usaha (LKU) 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik 4. Melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50 g/ekor dan 5. Setelah melakukan usaha pembesaran kepiting soka		servasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									selama 3 tahun selanjutnya wajib menggunakan benih kepiting soka produksi sendiri			
34	03217	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											daerah provinsi	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran Tumbuhan air laut 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Gubernur
											1. Menggunakan tenaga kerja asing	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Rencana pembiayaan				2. Di kawasan konservasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	
35	03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.149

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											pemerintah daerah provinsi	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap	3 Hari	1. Standar proses pembesaran budi daya biota air laut lainnya 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Gubernur
											1. Menggunakan tenaga	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.150

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tahapan kegiatn 7. Rencana pembiayaan				kerja asing 2. Di kawasan konservasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	
36	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan	Bupati/ Wali Kota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.151

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									daya ikan yang baik		2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif,	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.152

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupa-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan				ten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											3. Menggunakan teknologi super intensif	
37	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan	Bupati/ Wali Kota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.156

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif,	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau 3. Menggunakan teknologi superintensif	Menteri/ Kepala Badan
38	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupa-	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									daya ikan yang baik		ten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran ikan air Tawar di karamba 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan				lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi dan/atau 2. Menggunakan tenaga kerja asing	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.161

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di sawah 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif,	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		ikan yang baik		atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
											Lokasi usaha berada di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.164

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
40	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki	3 Hari	1. Standar proses produksi budi daya ikan hias air tawar 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif,	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		ikan yang baik		atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											2. Menggunakan tenaga kerja asing	
41	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Menerapkan cara pembenihan ikan yang baik dan 3. Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk	Sertifikat cara pembenihan ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik dan 3. Untuk produksi induk harus		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan		sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
											1. Lokasi usaha berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau 3. Menggunakan teknologi super intensif	
42	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederha-	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											na, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi:	3 Hari	1. Standar proses produksi		1. Lokasi usaha berada di dalam	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi dan/atau 2. Menggunakan tenaga kerja asing	Menteri/ Kepala Badan
43	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									daya ikan yang baik		2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.175

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan	3 Hari	1. Standar proses produksi budi daya ikan air tawar di media lainnya 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Rencana pembiayaan				provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau 3. Menggunakan teknologi super intensif	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.177

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
44	03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing: 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis	Menteri/ Kepala Badan

SK No 122526 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.A.178

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											nasional tertentu	
45	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
46	03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Sertifikat penerapan distribusi ikan khusus skala usaha Menengah dan Besar dan 3. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik khusus skala usaha mikro dan kecil	Sertifikat penerapan distribusi ikan	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											nasional dan/atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
47	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing 3. Di kawasan konservasi nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											4. Di kawasan strategis nasional dan/atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
48	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing: 3. Di kawasan kon-	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											servasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
49	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Sertifikat penerapan distribusi ikan khusus skala usaha menengah dan besar dan 3. Menerapkan cara distribusi ikan yang	Sertifikat penerapan distribusi ikan	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									baik khusus skala usaha mikro dan kecil		3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
50	03251	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Air Payau	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
				- Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi:	3 Hari	1. Standar proses		1. Lokasi usaha berada di	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		produksi pembesaran Pisces/ikan bersirip air payau 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/ atau 3. Menggunakan teknologi super intensif	Menteri/ Kepala Badan
51	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU)	Sertifikat cara pembenihan	1. Lokasi usaha berada di dalam	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menerapkan cara pembenihan ikan yang baik dan 3. Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk	ikan yang baik	satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik dan 3. Untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		operasional pemuliaan		kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/ atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											3. Menggunakan teknologi super intensif	
52	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran mollusca air payau 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
											1. Lokasi usaha berada di	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.193

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											lintas provinsi dan/atau 2. Menggunakan tenaga kerja asing	
53	03254	Pembesaran *Crustacea* Air Payau	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran *Crustacea* air payau		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupa-	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		ten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau 3. Menggunakan teknologi super intensif	Menteri/ Kepala Badan
54	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik		Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran Tumbuhan air payau 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan				2. Menggunakan tenaga kerja asing	
55	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.199

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran Budi daya		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupa-	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		biota air payau lainnya 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		ten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau 3. Menggunakan teknologi super intensif	Menteri/ Kepala Badan
56	0326 i	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Seluruh	Seluruh	Menegah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
57	03262	Jasa Produksi Budidaya	Seluruh	Seluruh	Menegah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/Wali Kota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.203

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ikan Air Payau									1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/Kepala Badan
58	03263	Jasa Pasca	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah		-	Otomatis		Sertifikat penerap-	Lokasi usaha di wilayah	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Panen Budidaya Ikan Air Payau				NIB dan Sertifikat Standar			1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Sertifikat penerapan distribusi ikan khusus skala usaha Menengah dan Besar dan 3. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik khusus skala usaha mikro dan kecil	an distribusi ikan	kabupaten/ kota 1. Menggunakan tenaga kerja asing 2. Di kawasan konservasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/ Kepala Badan
59	03271	Pengembangbiakan Ikan Bersirip	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(*Pisces*) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	pemanfaatan ikan bersirip *Pisces* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat				(SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan 5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari pengembangbiakan Contoh ikan						6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bersirip yang termasuk kelompok ini: Ikan Napoleon, Ikan Capungan Banggai, Ikan Hiu Lanjaman, Ikan Hiu Martil, Ikan Pari Mobula, Kuda Laut, Ikan Arwana, dll						berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
60	03272	Pengembangbiakan *Crustacea* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Crustacea* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat-Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.210

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengemban gan, pengem-bang-biakan, perdaga-ngan dalam negeri, perdaga-ngan luar negeri, aquaria						5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembang-biakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan meng-arsipkan dokumen legalitas asal usul			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hasil dari pengembangbiakan Contoh *Crustacea* yang masuk dalam kelompok ini: *Tachypleus gigas*, *Tachypleus tridentatus*, dan *Carcinoscorpius rotundicauda*						kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melaku-			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.212

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Appendiks CITES			
61	03273	Pengembangbiakan *Mollusca* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Mollusca* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat-Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran Penerimaan	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan, pengem-bang-biakan, perdaga-ngan dalam negeri, perdaga-ngan luar				Negara Bukan Pajak		5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembang-biakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan meng-arsipkan dokumen legalitas asal usul kepe-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			negeri, aquaria hasil dari pengem-bangbiakan Contoh *Mollusca* yang masuk dalam kelompok ini: *Tridacna spp*, (Kima) dan *Strombus gigas* (Keong Ratu)						milikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melaku-kan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melaku-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan pengang-kutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melaku-kan kegiatan pemeliharaan dan pengang-kutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
62	03274	Pengembangbiakan *Coelenterata* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Coelenterata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat-Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran Penerimaan	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdaga-				Negara Bukan Pajak		hasil pengembangbiakan 5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ngan luar negeri, aquaria hasil dari pengembangbiakan Contoh *Coelenterata* yang masuk dalam kelompok ini: *Antipatharia spp, Helioporidae* spp, *Sclerectinia* spp, *Tubiporidae* spp, dan *Milleporidae* spp						usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
63	03275	Pengembangbiakan *Echinodermata* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Echinodermata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaat-	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat-Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			annya sesuai ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan, pengem-bang-biakan, perdaga-ngan dalam negeri,				Penerimaan Negara Bukan Pajak		hasil pengem-bangbiakan 5. Menerapkan sistem penan-daan untuk jenis ikan hasil pengem-bangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengar-sipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari pengembangbiakan Contoh *Ceolenterata* yang masuk dalam kelompok ini: *Holothoria fuscogilva, Holothuria nobilis,* dan *Holothoria whitmaei*						usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
64	03276	Pengembangbiakan *Amphibia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Amphibia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdaga-				Penerimaan Negara Bukan Pajak		hasil pengembangbiakan 5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ngan luar negeri, aquaria hasil dari pengem-bang-biakan						usul kepemi-likan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melaku-kan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
65	03277	Pengembangbiakan *Reptilia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Reptilia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdaga-				Penerimaan Negara Bukan Pajak		hasil pengembangbiakan 5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ngan luar negeri, aquaria hasil dari pengembangbiakan Contoh Reptilia yang masuk dalam kelompok ini: *Amyda cartilaginea, Chitra chitra*, dan *Carettochelys insculpta*						usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
66	03278	Pengembangbiakan *Mamalia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *mamalia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaat-	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			annya sesuai ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan, pengem-bang-biakan, perdaga-ngan dalam negeri,				Penerimaan Negara Bukan Pajak		hasil pengem-bangbiakan 5. Menerapkan sistem penan-daan untuk jenis ikan hasil pengem-bangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengar-sipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari pengembangbiakan Contoh *mamalia* yang masuk dalam kelompok ini: lumba-lumba						usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
67	03279	Pengembangbiakan *Algae* dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha pengembangbiakan *Algae* dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang dibatasi pemanfaat-annya sesuai ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan, pengem-bang-biakan,				Penerimaan Negara Bukan Pajak		hasil pengem-bangbiakan 5. Menerapkan sistem penan-daan untuk jenis ikan hasil pengem-bangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan meng-arsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari pengembangbiakan						usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
68	08104	Penggalian Pasir	Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan, dan pemisahan pasir yang berlokasi di laut selain yang berasal dari : 1. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Menteri 2. Dokumen Rencana Kerja Tetap 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	21 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak lanjutan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kepentingan Pelabuhan dan terminal khusus 2. Wilayah izin usaha pertambangan 3. Alur pelayaran dan 4. Zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan									

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengelolaan kawasan konservasi, yang dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi									
69	08930	Ekstraksi Garam	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Laporan pelaksanaan usaha	-	1. Usaha mikro dan 2. Tidak memiliki fasilitas pengambilan air laut menetap	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen rencana teknis	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran retribusi		1. Usaha Mikro dan 2. Memiliki fasilitas pengambilan air laut menetap di kawasan perairan ≤12 mil di luar kewenangan Menteri	Gubernur
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Dokumen rencana teknis	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan		1. Kawasan perairan	Menteri/

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		>12 mil atau 2. ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Stra-	Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											tegis Nasional Tertentu d. Penyertaan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasional atau f. Kawas-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											an lintas provinsi	
70	10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical*	Seluruh	Bupati/ Wali kota
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizi-		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ 3. HACCP untuk tujuan ekspor dan 4. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga	*Control Point* - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka peneliti-		Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk	an dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan			
71	10212	Industri pengasapan/ pemanggangan ikan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/haccp untuk tujuan eksport dan 3. Laporan kegiatan usaha	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Izin Penerapan	Seluruh	Bupati/ Wali Kota
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja,	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Persetujuan Pelak-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja dan d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk	sanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.253

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan	Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control* Point - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.254

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Akun Perusahaan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		
72	10213	Industri pembekuan ikan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usa	- Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usah		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.258

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja	Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
73	10214	Industri pemindangan ikan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan	- Sertifikat Kelayakan Peng-	Seluruh	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	olahan (SKP) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta	- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produk-		
				- Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar					setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga	si UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Persetujuan Pa-		Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume	ngan Olahan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Wilayah pemasaran		usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hari kerja tenaga kerja dan d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
74	10217	Industri Pendinginan/Pengemasan Ikan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan	- Sertifikat Kelayakan Pengo-	Seluruh	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	lahan (SKP) - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran		3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	Dalam Negeri		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran		berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas		Seluruh PMDN	Gubernur
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran		HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kela-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									min tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.A.278

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
75	10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* - Surat Persetujuan	Seluruh	Bupati/ Wali kota
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
76	10292	Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Pro-	Seluruh	Bupati/ Wali kota
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat		Seluruh PMDN	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga	duksi Pangan Olahan yang Baik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk	- Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Promosi Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifi-kat Perse-tujuan Pangan Olahan - Surat Perse-tujuan Pe-nilaian TKDN Peng-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		
77	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard*	Seluruh	Bupati/ Wali kota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.A.288

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana	*Analysis and Critical Control Point* - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk	Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi	dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
78	10294	Industri pemindangan biota air lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Izin Penerapan Program Manajemen	Seluruh	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	*Critical Control Point* - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Sertifikat Pemenuhan Komit-		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis	men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.A.296

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
79	10297	Industri Pendinginan/Pengemasan Biota Air Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun lama setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Sertifikat Penerapan Program Manajemen	Seluruh	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Laporan kegiatan usaha	Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah	pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
80	10298	Industri pengolahan rumput laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Izin Penerapan Pro-	Seluruh	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	gram Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik - Sertifikat Pemenuhan Komit-		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat:		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.A.303

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pa-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	ngan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point*		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.305

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, sta-	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pemenuhan Komitmen Produk-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tus tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk	si Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan	Persetujuan Pangan Olahan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah	masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
				Mene-ngah dan Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.A.312

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
81	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	Mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari laut, dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran Retribusi	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Wilayah perairan ≤12 mil, diluar kewenangan Menteri 2. Debit pengambilan air laut setara <30 m3/bulan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelola-an adminis-tratif dari perusaha-an air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga,	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen rencana teknis	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		1. Wilayah perairan >12 mil atau 2. Wilayah ≤ 12 mil dengan kriteria: a. Debit peng-ambil-an air laut setara ≥30 m3/ bulan b. Kawa-san Stra-tegis Nasio-nal	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			instansi/ lembaga/ badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan								c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Penyertaan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasional f. Kawasan lintas	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											provinsi	
82	36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air (laut) baku yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari dengan atau tanpa pengolahan untuk keperluan industri, pembangkit	Kecil	Rendah	NIB	-	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran Retribusi	-	1. Wilayah perairan ≤12 mil, diluar kewenangan Menteri 2. Debit pengambilan air laut setara <30 m3/bulan	Gubernur
				- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Dokumen rencana teknis	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran Penerimaan		1. Wilayah perairan >12 mil atau 2. Wilayah ≤ 12 mil dengan kriteria:	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			listrik dan lain-lain						Negara Bukan Pajak		a. Debit pengambilan air laut setara ≥30 m3/ bulan b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											d. Penyertaan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasional f. Kawasan lintas provinsi	
83	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Seluruh	- Menengah - Besar	Menengah. Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha	5 Hari 3 Hari	1. Memiliki Sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun	- Sertifikat Penerapan Pro-	Seluruh PMDN Seluruh	Gubernur Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses dan 6. Wilayah pemasaran		setelah Perizinan Berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP sepanjang untuk tujuan ekspor 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga	gram Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* - Sertifikat penerapan distribusi ikan - Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan-/atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan 4. Asal bahan baku berasal dari kapal penangkap ikan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, sepanjang di-persyaratkan oleh negara tujuan ekspor dan/atau pasar dalam negeri			
84	46324	Per-dagangan Besar	Seluruh	- Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampai-kan rencana usaha	5 Hari 3 Hari	1. Memiliki Sertifikat penerapan	- Sertifi-kat Pe-menuh-	Seluruh PMDN Seluruh	Gubernur Menteri/

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Hasil Olahan Perikanan		- Besar			yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran		distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat:	an Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Ko-		Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja	mitmen Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat penerapan distribusi ikan - Sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/ Hazard Analy-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan 4. Asal bahan baku berasal dari kapal penangkap ikan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik,	sis and Critical Control - Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Ko-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor dan/atau pasar dalam negeri	mitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan-/atau Bahan Penolong		
85	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha 2. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan	- Sertifikat penerapan distribusi ikan	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil perikanan dan 3. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan-/atau Bahan Penolong		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk yang dihasilkan 2. Memiliki Sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit			
86	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha 2. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan	- Sertifikat penerapan distribusi ikan - Penetapan Pusat	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik	Penyedia Bahan Baku dan-/atau Bahan Penolong		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis 2. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan 3. Memiliki Sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit			
87	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.A.333

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
88	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	Usaha Perdagangan eceran berbagai jenis ikan olahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar),	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan-/atau Bahan	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			seperti abon, sosis, bakso, ikan teri, cucut, selar, kerapu dan ikan, udang, kerang yang diasinkan, atau dikering-kan,							Pe-nolong		
89	47828	Per-dagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan	Usaha Per-dagangan eceran berbagai jenis pakan ikan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha	Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pakan Ikan	muka (emper) toko atau tempat di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti pakan ikan, konsentrat pakan ikan, dan tepung kerang,									
90	50133	Angkut-an Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Kelompok ini mencakup usaha pengang-kutan barang	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar	- Surat Izin Kapal Pe-ngang-kut Ikan	1. Kapal pe-ngangkut ikan atau kapal pendu-kung operasi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.A.336

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan, alat Penangkapan ikan, atau alat bantu Penangkapan ikan						3. Melaporkan jenis dan berat ikan muatan dan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	- Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan	Penangkapan ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT dan 2. Beroperasi di WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan, untuk:	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											a. Kapal pendukung operasi Penangkapan ikan atau b. Kapal pengangkut ikan yang beroperasi antar pelabuhan pangkalan	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A.338

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik	7 Hari	1. Merealisasikan kapal pengangkut ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin kapal pengangkut ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan muatan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		1. Kapal pengangkut ikan atau kapal pendukung operasi Penangkapan ikan berupa kapal lampu di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pengang-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum				kut ikan dan kapal pendu-kung operasi Penang-kapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerin-tahan Aceh) dan 2. Beropera-si di: a. WPP-NRI paling jauh	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaik an dari				12 (dua belas) mil laut di wila-yah admi-nistra-si pro-vinsi yang ber-sang-kutan, untuk kapal peng-angkut ikan yang bero-perasi dari daerah Pe-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				nang-kapan ikan ke pela-buhan pang-kalan b. WPP-NRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wila-yah admi-nistra-si pro-vinsi yang ber-sang-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											kutan, untuk Kapal pendukung operasi Penangkapan ikan atau c. Wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan untuk Kapal pengangkutan ikan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											yang beroperasi antar pelabuhan pangkalan	
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal	4 Hari	1. Merealisasikan kapal pengangkut ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin kapal pengangkut ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan		1. Kapal pengangkut ikan atau kapal pendukung operasi Penangkapan ikan berupa kapal lampu di atas 5 (lima) GT sampai dengan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perikan-an dan 3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum		ikan muatan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pengang-kut ikan dan kapal pendu-kung operasi Penang-kapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerin-tahan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan				Aceh) dan 2. Beroperasi di: a. WPP-NRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan, untuk kapal peng-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan				angkut ikan yang bero-perasi dari daerah Pe-nang-kapan ikan ke pela-buhan pang-kalan b. WPP-NRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wila-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				yah administrasi provinsi yang bersangkutan, untuk Kapal pendukung operasi Penangkapan ikan atau c. Wilayah administrasi provinsi yang	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											bersangkutan untuk Kapal pengangkut ikan yang beroperasi antar pelabuhan pangkalan	
91	50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat:	4 Hari	1. Merealisasikan kapal pengangkut ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin kapal pengangkut ikan	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	1. Kapal pengangkut ikan berukuran paling kecil 20 (dua puluh) GT dan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yaitu ikan Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya, serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur				1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan		3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan muatan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		2. Beroperasi antarnegara	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			antar-pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri termasuk usaha persewaan angkutan laut berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan berikut operator-nya				atau penanggung jawab badan hukum d. Pas foto orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perseorangan atau penang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
92	52224	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan perikanan yaitu seperti	- Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Penetapan oleh menteri sebagai pelabuhan perikanan yang tidak dibangun pemerintah pusat dan	15 Hari	1. Memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan 2. Menerapkan sistem informasi kepelabuhanan perikanan dan	Pemindai Bagasi atau Barang Lainnya Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengoperasian fasilitas pelabuhan perikanan dan dermaga dan/atau pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan				pemerintah daerah 2. Rencana operasional pelabuhan perikanan dan 3. Pernyataan kesiapan mengoperasionalkan pelabuhan perikanan dengan melampirkan: a. Data fasilitas yang dimiliki beserta foto b. Data sumber daya		3. Melaporkan kegiatan pelabuhan perikanan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang dimiliki dan c. Data ketersediaan anggaran operasional					
			Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan perikanan yaitu pelayanan bongkar muat ikan dan lain-lain	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sarana bongkar muat ikan seperti keranjang, atau palet 2. Memiliki timbangan 3. Memiliki sarana pendinginan seperti *cool box* atau es 4. Memiliki sarana pengangkutan		1. Pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis pemerintah pusat dan 2. Pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									seperti gerobak dorong, kendaraan roda tiga dan/atau roda empat 5. Memiliki selasar 6. Menjaga kebersihan sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan 7. Menjaga dan mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja 8. Memiliki penanggung jawab pengoperasian pelayanan		pemerintah pusat dan pemerintah daerah	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bongkar muat ikan dan 9. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya setiap 6 (enam) bulan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki sumber daya manusia tenaga bongkar muat 2. Memiliki sarana bongkar muat ikan seperti *forklift, crane,* keranjang, atau pallet	15 Hari	1. Memiliki sarana bongkar muat ikan seperti keranjang, atau palet 2. Memiliki timbangan 3. Memiliki sarana pendinginan seperti *cool box* atau es		Pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis daerah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki timbangan 4. Memiliki sarana pendinginan seperti *cool box*, atau es 5. Memiliki selasar 6. Memiliki sarana dan prasarana keselamatan kerja 7. Memiliki kendaraan pengangkut ikan berpendingin atau kendaraan yang dilengkapi dengan		4. Memiliki sarana pengangkutan seperti gerobak dorong, kendaraan roda tiga dan/atau roda empat 5. Memiliki selasar 6. Menjaga kebersihan sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan 7. Menjaga dan mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja 8. Memiliki penanggung			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana untuk menjaga suhu ikan dan 8. Memiliki penanggung jawab pengoperasian pelayanan bongkar muat ikan		jawab pengoperasian pelayanan bongkar muat ikan dan 9. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada gubernur sesuai kewenangannya setiap 6 (enam) bulan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki sumber daya manusia tenaga bongkar muat 2. Memiliki sarana bongkar muat ikan seperti *forklift, crane,*	15 Hari	1. Memiliki sarana bongkar muat ikan seperti keranjang, atau palet 2. Memiliki timbangan 3. Memiliki sarana pendinginan		1. Pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis pemerintah pusat dan 2. Pelabuhan perikanan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keranjang, atau *pallet* 3. Memiliki timbangan 4. Memiliki sarana pendinginan seperti *cool box*, atau es 5. Memiliki selasar 6. Memiliki sarana dan prasarana keselamatan kerja 7. Memiliki kendaraan pengangkut ikan berpendingin atau kendaraan yang		seperti *cool box* atau es 4. Memiliki sarana pengangkutan seperti gerobak dorong, kendaraan roda tiga dan/atau roda empat 5. Memiliki selasar 6. Menjaga kebersihan sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan 7. Menjaga dan mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja		yang tidak dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan sarana untuk menjaga suhu ikan dan 8. Memiliki penanggung jawab pengoperasian pelayanan bongkar muat ikan		8. Memiliki penanggung jawab pengoperasian pelayanan bongkar muat ikan dan 9. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangann ya setiap 6 (enam) bulan			
93	74909	Aktivitas Profesi-onal, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL	Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan Teknik lainnnya yang tidak	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen rencana pe-ngangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam 2. Bukti pembayaran	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Pembagian hasil penjualan/ pembagian benda muatan kapal	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			diklasifikasikan di tempat lain, yaitu jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam (kapal dan benda yang telah tenggelam ≥ 50 tahun, baik yang memiliki status cagar budaya, objek				Penerimaan Negara Bukan Pajak		tenggelam antara pemerintah dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			diduga cagar budaya maupun benda selain objek diduga cagar budaya/ cagar budaya)									
94	91039	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	Merupakan Perizinan Berusaha di Kawasan Konservasi yang meliputi : 1. Penyediaan infrastruktur pariwisata	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Berita acara verifikasi lapangan 2. Proposal rencana usaha 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau retribusi daerah	17 Hari	1. Memiliki sertifikat kompetensi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi untuk setiap SDM pengusahaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas	-	Kawasan Konservasi Daerah	Gubernur
											Kawasan Konservasi Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			alam perairan 2. Penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan 3. Penempatan infrastruktur budidaya				penerbitan izin pengurusan dalam hal peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atau peraturan daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi di daerah tersebut telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan		pemanfaatan di dalam kawasan konservasi 2. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan rencana usaha 3. Memiliki, melaksanakan, dan melaporkan Perjanjian Kemitraan dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi 4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atau retribusi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perikanan dan 4. Kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap				perundang-undangan		daerah atas kontribusi pemanfaatan kawasan konservasi dalam hal peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atau peraturan daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi daerah tersebut telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan			